

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengatur roda pemerintahan di daerah, pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Suatu daerah dapat maju dan berkembang apabila mampu menciptakan roda pemerintahan yang transparan, akuntabilitasnya tinggi, dan penerapan nilai mata uang yang benar. Pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah seluas-luasnya untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dengan pemberlakuan pemerintahan yang otonom maka terjadi perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini beralasan karena pengelolaan keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga sebagaimana amanah otonomi daerah. Pengelolaan keuangan antara lain bertujuan untuk pengendalian dana, menerapkan prinsip efisiensi di bidang pembiayaan dan pengelolaan daerah sehingga tercipta kondisi keuangan daerah yang efisien dan efektif dengan kinerja yang tinggi, dan dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat tentunya harus didukung dengan pembiayaan yang cukup. Pembiayaan ini pada akhirnya dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah. Bentuk

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah didukung dengan laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Salah satu laporan yang menjelaskan posisi keuangan pemerintah daerah yaitu laporan neraca. Laporan neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek. Untuk keperluan publikasi cukup ditampilkan rekening utama dan sub rekening satu level dibawahnya, sedangkan untuk kepentingan eksekutif dibutuhkan penyajian secara lengkap dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja.

Neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah Sesuai ketentuan PP No. 71 tahun 2010. Dalam menyusun neraca, pemerintah daerah perlu mengetahui kualitas aset yang dimiliki yaitu aset mana yang harus dipelihara dan mana yang sudah tidak ekonomis lagi sehingga harus dijual atau dihapuskan. Demikian juga dengan kewajiban, perlu diketahui berapa sebenarnya kewajiban yang segera jatuh tempo dan belum jatuh tempo untuk dapat memprediksi pembayaran atau pembiayaan. Selanjutnya dari semua itu dapat diketahui apakah ekuitas dana cenderung menurun atau meningkat setiap tahun,

sehingga dengan sistem peringatan dini bila ekuitas menuju negatif akan diketahui bahwa kewajiban lebih besar daripada aset yang dimiliki pemerintah daerah.

Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu: kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Sedangkan kewajiban jangka panjang jatuh temponya lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

Ekuitas dana terdiri dari tiga kelompok yaitu: ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek/lancar. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi kewajiban jangka panjang. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai entitas pemerintah daerah harus menyajikan kekayaan atau kondisi keuangannya mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki agar dapat memberikan suatu gambaran mengenai jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.

Kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah sangat penting untuk dianalisis, tujuannya adalah untuk memahami dan mendiagnosa informasi

yang terkandung dalam kewajiban dan ekuitas yang dimiliki dengan tujuan untuk menilai kesehatan keuangan serta membuat perkiraan tentang prospek masa depan suatu pemerintahan. Analisis kewajiban perlu dilakukan agar dapat diketahui dengan jelas berapa sebenarnya kewajiban yang segera jatuh tempo dan belum jatuh tempo, mana kewajiban yang paling besar setiap tahunnya dan seberapa mampu pemerintah daerah membiayai kewajibannya. Selanjutnya dari semua itu dapat diketahui apakah ekuitas dana cenderung meningkat atau menurun setiap tahunnya sehingga bila ekuitas dana menuju ke negatif akan diketahui bahwa kewajiban lebih besar dari kekayaan yang dimiliki. Suatu kewajiban dikatakan baik apabila kewajiban itu berkurang dan ekuitas dana yang dimiliki juga dikatakan baik apabila ekuitas dana tersebut mengalami peningkatan atau lebih besar dan mampu dalam membiayai kewajiban yang timbul.

Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara menggambarkan kondisi keuangan yang dimiliki, yang dapat disajikan dalam laporan neraca.

Berikut ini data neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1
Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
Laporan Neraca
Periode 31 Desember Tahun 2016-2020

Akun/Keterangan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Aset					
Jumlah aset Lancar	Rp 105.548.428.263,54	Rp 146.114.244.955,33	Rp 165.576.943.017,87	Rp 210.917.963.335,52	Rp 210.551.117.445,19
Jumlah Investasi Jk. Panjang	Rp 64.286.049.970,77	Rp 99.153.581.015,82	Rp 97.875.312.402,00	Rp 97.122.921.482,00	Rp 102.327.326.532,00
Jumlah Aset Tetap	Rp1.248.507.113.315,00	Rp1.342.542.295.378,00	Rp1.294.722.573.518,00	Rp1.880.231.428.692,58	Rp1.407.975.927.800,44
Jumlah Aset Lainnya	Rp 51.818.496.276,89	Rp 80.132.238.481,07	Rp 63.149.419.221,07	Rp 256.328.603.912,44	Rp 89.577.779.633,12
Jumlah Aset	Rp1.667.942.359.830,22	Rp1.470.160.087.826,20	Rp1.621.324.248.158,94	Rp2.444.600.917.422,54	Rp1.810.432.151.410,75
Kewajiban					
Jumlah Kewajiban Jk. Pendek	Rp 22.402.503.822,50	Rp 9.295.453.395,50	Rp 8.461.902.661,30	Rp 17,761.027.884,98	Rp 8.506.491.029,00
Jumlah Kewajiban Jk. Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah Kewajiban	Rp 22.402.503.822,50	Rp 9.295.453.395,50	Rp 8.461.902.661,30	Rp 17,761.027.884,98	Rp 8.506.491.029,00
Ekuitas					
Jumlah ekuitas Dana	Rp1.447.757.584.003,70	Rp1.658.646.906.434,72	Rp1.612.862.345.497,64	Rp2.426.839.889.537,56	Rp1.801.925.660.381,75
Jumlah Ekuitas Dana	Rp1.447.757.584.003,70	Rp1.658.646.906.434,72	Rp1.612.862.345.497,64	Rp2.426.839.889.537,56	Rp1.801.925.660.381,75
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas dana	Rp1.470.160.087.826,20	Rp1.667.942.359.830,22	Rp1.621.324.248.158,94	Rp2.444.600.917.422,54	Rp1.810.432.151.410,75

Sumber :Bagian Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa pada tahun 2016 kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar Rp22.402.503.822,50 pada tahun 2017 kewajibannya menurun menjadi Rp9.295.453.395,50 pada tahun 2018 kewajibannya menurun lagi menjadi Rp8.461.902.661,30 namun pada tahun 2019 kewajiban pemerintah meningkat mejadi Rp17,761.027.884,98 dan pada tahun 2020 kewajiban pemerintah berkurang menjadi Rp8.506.491.029,00. Sedangkan jumlah ekuitas dana Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2016 sebesar Rp1.447.757.584.003,70 pada tahun 2017 ekuitasnya meningkat menjadi Rp1.658.646.906.434,72 pada tahun 2018 ekuitasnya sebesar Rp1.612.862.345.497,64, pada tahun 2019 sebesar Rp2.426.839.889.537,56 dan pada tahun 2020 ekuitas dana yang ada sebesar Rp1.801.925.660.381,75.

Kewajiban dan ekuitas dana merupakan salah satu bagian yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten Timor Tengah Utara, jika dilihat dari kondisi neraca tahun 2016-2020 kewajibannya cenderung mengalami fluktuasi karena adanya penambahan kewajiban dan juga adanya pembayaran kewajiban, dari tahun 2018 ke tahun 2019 adanya penambahan kewajiban yang bersumber dari kewajiban jangka pendek diantaranya kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang beban, dan kewajiban jangka pendek lainnya yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan dalam pemerintahan. Disandingkan dengan ekuitas dana pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, kondisi ekuitas dana pada neraca juga

mengalami fluktuasi, sama seperti kewajiban dan dapat dilihat bahwa pengadaan sumber-sumber pembiayaan oleh pemerintah daerah tujuannya untuk operasional tapi perlu dianalisis kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kewajiban-kewajiban atau pembiayaan yang timbul.

Berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Timor Tengah Utara kewajibannya meningkat pada tahun 2019 dan menurun di tahun 2020, dan berdasarkan laporan keuangan tersebut, pada tahun 2020 BPK memberikan opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**, dengan hal yang dikecualikan yaitu kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pada pegawai yang pensiun, diberhentikan dan tugas belajar, dan penyelesaian atas utang jangka pendek lainnya yang belum optimal.

Opini pemeriksaan sering dijadikan sebagai pengukuran kinerja suatu daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya yang bersifat eksternal. Penelitian yang dilakukan Virgasari (2009) menyatakan bahwa opini pemeriksaan berpengaruh positif dan negative terhadap kinerja pemerintah daerah, dimana semakin baik opini yang diperoleh pemerintah daerah maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah tersebut dan sebaliknya. Penelitian lain yang meneliti pengaruh opini terhadap kinerja pemerintah daerah juga dilakukan oleh Marfiana (2013) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara opini pemeriksaan BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dari hasil penemuan BPK yang memberikan opini WDP, dengan hal yang dikecualikan yaitu kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pada

pegawai yang pensiun, diberhentikan dan tugas belajar, dan penyelesaian atas utang jangka pendek lainnya yang belum optimal, maka opini BPK tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Berdasarkan uraian masalah di atas, membuat penulis tertarik untuk meneliti Kewajiban dan Ekuitas Dana untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan alat analisis rasio keuangan. Dengan demikian penulis melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kewajiban dan Ekuitas dana Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2016-2020**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara jika dilihat dari analisis pertumbuhan kewajiban, analisis kewajiban terhadap ekuitas dana, analisis kewajiban terhadap aset, dan analisis kewajiban terhadap total pendapatan daerah tahun anggaran 2016-2020?
2. Bagaimana perkembangan ekuitas dana Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara jika dilihat dari dan analisis pertumbuhan ekuitas dana, dan analisis struktur ekuitas dana tahun anggaran 2016-2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara jika dilihat dari analisis pertumbuhan kewajiban, analisis kewajiban terhadap ekuitas dana, analisis kewajiban terhadap aset, dan analisis kewajiban terhadap total pendapatan daerah tahun anggaran 2016-2020.
2. Untuk mengetahui perkembangan ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara jika dilihat dari dan analisis pertumbuhan ekuitas dana, dan analisis struktur ekuitas dana tahun anggaran 2016-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut ;

1. Bagi penulis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis mengenai analisis laporan keuangan dalam hal ini analisis kewajiban dan ekuitas dana.
2. Bagi pemerintah daerah, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait pada pemerintah daerah
3. Bagi pihak lain, melalui penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian lebih lanjut.